



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUBHAN NOR YAUMIL**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **249251**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.169.256.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 678 m2/1.036 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , WARISAN Rp. 219.256.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **786.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1964, WARISAN Rp. 14.000.000
5. MOBIL, TOYOTA JIP Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. MOBIL, ZUZUKI JIMNY SUV Tahun 2024, LAINNYA Rp. 465.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **565.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	857.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.377.256.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.377.256.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.